

ABSTRAK

Standarisasi batas usia minimum kecakapan dalam beberapa perundang-undangan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakannya. Kecakapan hukum merujuk pada kemampuan individu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum yang berimplikasi pada suatu perjanjian. Berkembangnya teknologi melahirkan perjanjian pinjaman *online* yang memiliki pengaturan yang memperbolehkan anak dibawah usia untuk melakukan pinjaman. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk Mengkaji akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dibawah umur dalam perjanjian pinjaman *online* di platform *digital*. Kedua, untuk menganalisis dan menjelaskan upaya perlindungan hukum kepada perusahaan P2P *Lending* selaku kreditur

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Pada penelitian ini data yang telah didapatkan kemudian akan dianalisis secara deskriptis analitis. Data yang diperoleh akan dituangkan ke dalam bentuk uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan ketentuan perundang-undangan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama* akibat hukum terhadap perjanjian tersebut apabila salah satu pihak merasa dirugikan dapat melakukan pembatalan perjanjian dan perjanjian tidak dilanjutkan. Pihak yang melakukan pinjaman *online* dibawah umur atau debitur yang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian tersebut adanya akibat hukum yaitu adanya ganti rugi, pembatalan Perjanjian Peralihan resiko, Pembayaran biaya perkara dan dapat dilakukan mediasi, adjudikasi dan arbitrase apabila penyelesaian sebelumnya berlangsung dengan baik. *Kedua* bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan Perusahaan P2P *Lending* terdapat dalam peraturan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang berisi analisis pendanaan terhadap calon peminjam untuk mencegah pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan kewajiban dan adanya perlindungan hukum secara represif dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul setelah terjadi permasalahan, baik antara pengguna fintech dengan pengguna lainnya, maupun antara pengguna dengan penyelenggara.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Akibat Hukum

ABSTRACT

Standardization of the minimum age limit of competence in several laws creates legal uncertainty in its enforcement. Legal competence refers to an individual's ability to exercise rights and obligations in carrying out legal actions that have implications for an agreement. The development of technology has given birth to online loan agreements that have regulations that allow minors to take out loans. The purpose of this study is first, to examine the legal consequences of default by underage debtors in online loan agreements on digital platforms. Second, to analyze and explain legal protection efforts for P2P Lending companies as creditors.

The approach method used in this legal research is the normative legal approach method. The data used in this study are primary data, secondary data, and tertiary data. In this study, the data that has been obtained will then be analyzed descriptively analytically. The data obtained will be poured into a logical and systematic description that connects existing facts with statutory provisions.

The results of this study indicate that, first, the legal consequences of the agreement if one party feels aggrieved can cancel the agreement and the agreement is not continued. Parties who make underage online loans or debtors who default on an agreement have legal consequences, namely compensation, cancellation of the Risk Transfer Agreement, Payment of court costs and mediation, adjudication and arbitration can be carried out if the previous settlement was carried out properly. The two forms of preventive legal protection that can be carried out by P2P Lending Companies are contained in POJK Regulation Number 10/POJK.05/2022 which contains an analysis of funding for prospective borrowers to prevent violations and provide limitations in carrying out obligations and repressive legal protection is carried out to resolve disputes that arise after problems occur, both between fintech users and other users, or between users and organizers.

Keywords: *Breach of contract, Legal Protection, Online Loans, Legal Consequences*